

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

(AUDITED)





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Cut Meutia Nomor 44 Bandar Lampung 35214
Telp 487310 – 487311 Fax. (0721) 481440

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Item yang memadai dan isinya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan secara kayak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bandar Lampung, 31 Desember 2024

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung



Dra. EVIE FATMAWATY, M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19690210 199001 2 001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA				
Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0	0,00
Hasil Retribusi Daerah	102.723.500,00	111.316.600,00	108,37	79.361.252,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0	0,00
Total Pendapatan	102.723.500,00	111.316.600,00	108,37	79.361.252,00
Belanja Operasi – LRA				
Belanja Pegawai	13.218.942.116,40	12.241.496.684,00	92,61	12.399.798.414,00
Belanja Barang dan Jasa	7.434.986.421,90	7.254.893.893,00	97,58	13.240.401.057,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0	2.800.000.000,00
Belanja Hibah	567.698.000,00	566.653.500,00	99,82	5.179.796.432,00
Belanja Bantuan Sosial	1.408.750.000,00	1.408.500.000,00	99,98	77.000.000,00
Total Belanja Operasi	22.630.376.538,30	21.471.544.077,00	94,88	33.696.995.903,00
Belanja Modal – LRA				
Belanja Peralatan dan Mesin	181.245.000,00	181.245.000,00	100	899.771.400,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	321.127.430,00
Total Belanja Modal	181.245.000,00	181.245.000,00	100	1.220.898.830,00
Total Belanja (Operasi+Modal)	22.811.621.538,30	21.652.789.077,00	94,92	34.917.894.733,00
Surplus / (Defisit) Operasional	(22.708.898.038,30)	(21.541.472.477,00)	94,86	(34.838.533.481,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(22.708.898.038,30)	(21.541.472.477,00)	94,86	(34.838.533.481,00)



LAPORAN OPERASIONAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0
Pendapatan Retribusi Daerah	111.316.600,00	79.361.252,00	31.955.348,00	40,27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0
Total PAD	111.316.600,00	79.361.252,00	31.955.348,00	40,27
Beban Operasi	21.471.544.077,00	32.676.567.548,00	(11.205.023.471,00)	(34,29)
Beban Pegawai	12.241.496.684,00	12.399.798.414,00	(158.301.730,00)	(1,28)
Beban Persediaan	1.458.324.525,00	2.404.821.910,00	(946.497.385,00)	(39,36)
Beban Jasa	3.920.871.424,00	4.824.736.875,00	(903.865.451,00)	(18,73)
Beban Pemeliharaan	380.177.180,00	922.673.500,00	(542.496.320,00)	(58,80)
Beban Perjalanan Dinas	1.456.003.764,00	4.067.740.417,00	(2.611.736.653,00)	(64,21)
Beban Subsidi	39.517.000,00	2.800.000.000,00	(2.760.483.000,00)	(98,59)
Beban Hibah	566.653.500,00	5.179.796.432,00	(4.613.142.932,00)	(89,06)
Beban Bantuan Sosial	1.408.500.000,00	77.000.000,00	1.331.500.000,00	17,29
Beban Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0
Total Beban	21.471.544.077,00	32.676.567.548,00	(11.205.023.471,00)	(34,29)
Surplus / (Defisit) Operasional	(21.360.227.477,00)	(32.597.206.296,00)	(11.239.978.819,00)	(34,47)

LAPORAN NERACA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Piutang lainnya	0,00	0,00
Beban/Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Persediaan	3.291.500,00	267.455,00
Total Aset Lancar	3.291.500,00	267.455,00
ASET TETAP		
Tanah	1.879.004.000,00	1.879.004.000,00
Peralatan dan Mesin	11.718.363.823,00	11.486.583.733,00
Gedung dan Bangunan	10.505.600.718,00	10.393.500.718,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	668.685.928,00	668.685.928,00
Aset Tetap Lainnya	201.552.000,00	201.552.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(12.806.772.548,00)	(12.635.786.816,00)
Total Aset Tetap	12.166.433.921,00	11.993.539.563,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	7.850.000,00	7.850.000,00
Akumulasi Piutang Aset Lain-lain	(7.850.000,00)	(7.850.000,00)
Total Aset Lainnya	0,00	0,00
Total Aset	12.169.725.421,00	11.993.807.018,00

LAPORAN NERACA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	2024	2023
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	27.716.053,00	19.470.093,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Total Kewajiban Jangka Pendek	27.716.053,00	19.470.093,00
EKUITAS		
Ekuitas	12.142.009.368,00	11.974.336.925,00
Total Ekuitas	12.142.009.368,00	11.974.336.925,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	12.169.725.421,00	11.993.807.018,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis dan daftar terperinci atas suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan adanya laporan keuangan daerah diharapkan akan terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat diharapkan akan semakin partisipatif didalam mendukung jalannya pemerintahan sebagaimana diharapkan dalam konsep Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a. **Akuntabilitas**, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. **Manajemen**, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- c. **Transparansi**, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- d. **Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)**, yaitu membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi



yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut,

- e. **Evaluasi Kinerja** yaitu, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan :

- a. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, aset, kewajiban dan ekuitas dana sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024
15. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1. Rincian dari Penjelasan Laporan Realisasi APBD Per 31 Desember 2024.
- 3.2. Rincian dari Penjelasan Laporan Operasional Per 31 Desember 2024.
- 3.3. Rincian dari Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024.
- 3.4. Rincian dari Penjelasan Pos-pos Neraca Per 31 Desember 2024.



BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

- 4.1. Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- 4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

BAB V. LAMPIRAN